
Manifestasi *Post Truth*: Analisis Wacana Kritis Atas Konten *Deepfake* Sri Mulyani “Guru sebagai Beban Negara”

Dewi Christina Marbun

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email: dewichristina@unibi.ac.id

Diterima:
4 November 2025

Diterima Setelah Revisi:
19 November 2025

Dipublikasikan:
28 November 2025

Abstrak

Era *post-truth* ditandai dengan kemenangan emosi atas fakta, sebuah kondisi yang diperparah oleh teknologi disinformasi canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis manifestasi *post-truth* melalui studi kasus viralnya konten *deepfake* Menteri Keuangan Sri Mulyani yang seolah-olah menyatakan "Guru sebagai Beban Negara." Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough. Adapun unit analisis penelitian berupa cuplikan dan transkrip video hasil rekayasa *deepfake* yang menampilkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, yang didukung oleh pernyataan klarifikasi resmi dan konteks isu kesejahteraan guru. Teknik analisis data menggunakan tiga dimensi AWK yakni teks, praktik wacana, dan praktik sosial budaya. Untuk keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan video rekayasa *deepfake*, pernyataan klarifikasi resmi, dengan konteks isu faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa video rekayasa *deepfake* ini beroperasi sebagai senjata ideologis yang berhasil memobilisasi publik. Pada dimensi teks, terdapat manipulasi AI di mana diksi "beban negara" dikonstruksi untuk memicu kemarahan publik. Pada dimensi praktik wacana, menunjukkan bahwa manifestasi *post-truth* diperkuat oleh sirkulasi di ruang gema (*echo chamber*) yang menyebabkan faktor emosional mengalahkan fakta objektif. Terakhir, pada dimensi praktik sosial budaya, ditemukan bahwa video *deepfake* mengeksploitasi isu kesejahteraan guru untuk memperkuat ideologi populisme anti-elite dan mendelegitimasi otoritas negara. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa kasus ini adalah contoh bagaimana video *deepfake* tidak hanya menyebarkan *hoax*, tetapi berhasil mengubah wacana rasional menjadi wacana moral yang emosional.

Kata Kunci: *Post-Truth*, *Deepfake*, Analisis Wacana Kritis, Norman Fairclough, Sri Mulyani.

Abstract

The post-truth era is characterized by the victory of emotion over fact, a condition exacerbated by advanced disinformation technology. This research aims to critically analyze the manifestations of post-truth through a case study of the viral deepfake content of Minister of Finance Sri Mulyani seemingly declaring "Teachers as a Burden on the State." This study employs a qualitative approach with the Critical Discourse Analysis (CDA) methodology of Norman Fairclough. The unit of analysis comprises the deepfake video clips and transcripts featuring Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, at the Indonesian Science, Technology, and Industry Convention Forum at ITB, supported by official clarification statements and the context of teacher welfare issues. The data analysis technique utilizes the three dimensions of CDA: text, discursive practice, and sociocultural practice. For data validity, the research uses source triangulation by comparing the deepfake video, the official clarification statement, and the factual context of the issue. The results indicate that this deepfake video operates as an ideological weapon that successfully mobilizes the public. In the text dimension, there is AI manipulation where the diction "burden on the state" is constructed to trigger

public outrage. The discursive practice dimension shows that the manifestation of post-truth is reinforced by circulation in echo chambers, causing emotional factors to override objective facts. Finally, the sociocultural practice dimension finds that the deepfake video exploits the issue of teacher welfare to strengthen anti-elite populism and delegitimize state authority. The study concludes that this case exemplifies how deepfake videos do not merely spread hoaxes, but successfully transform rational discourse into emotional moral discourse.

Keywords: *Post-Truth, Deepfake, Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Sri Mulyani.*

1 PENDAHULUAN

Kondisi dunia kontemporer saat ini ditandai oleh pergeseran kondisi epistemik yang dikenal sebagai era *post-truth*. Keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk opini publik, dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi (Davis, 2017). Fenomena ini diperparah oleh masifnya disinformasi melalui media digital dan algoritma yang menciptakan *echo chamber* dan *filter bubble*, yang memperkuat bias konfirmasi (Smith, 2022). Polarisasi menjadikan ruang digital menjadi rentan terhadap manipulasi dan disinformasi, di mana kebenaran sering kali tergantikan oleh narasi emosional dan sesuai dengan ideologi yang telah dipercaya (Laybats & Tredinnick, 2016).

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar terhadap cara manusia memproduksi dan memaknai kebenaran. Salah satu manifestasi paling berbahaya dari era *post-truth* adalah penggunaan teknologi manipulasi canggih seperti *deepfake* (Kaur, 2024). Teknologi *deepfake* adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang mampu memanipulasi citra dan suara seseorang secara sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari kenyataan (Maras & Alexandrou, 2019). *Deepfake* telah menjadi simbol dari era *post-truth*, yaitu masa ketika batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur, dan kebenaran sering kali ditentukan oleh emosi, opini, dan kepercayaan pribadi dibanding oleh bukti empiris (Westerlund, 2019).

Penelitian ini mengambil studi kasus viralnya konten *deepfake* yang menampilkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang seolah-olah menyatakan bahwa "guru sebagai beban negara" (cnnindonesia.com, 2025). Video tersebut berujung viral di berbagai platform media sosial seperti TikTok, X (Twitter), dan WhatsApp. Narasi tentang kesejahteraan guru dan alokasi anggaran pendidikan pada video *deepfake* berhasil memicu reaksi emosional yang kuat dari masyarakat dan menjadi titik rentan dalam hubungan antara negara dan rakyat. Mirisnya, banyak warganet mempercayai isi video tersebut tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Padahal, video tersebut adalah hasil manipulasi digital yang tidak pernah terucap.

Sebagai produk budaya digital, *deepfake* tidak bisa dipandang semata-mata sebagai hasil teknologi semata. *Deepfake* meniru tanda-tanda keaslian, mengaburkan batas antara realitas dan simulasi, serta menantang otoritas institusi dalam mendefinisikan kebenaran (Kwok & Koh, 2021). Fenomena ini mencerminkan pergeseran epistemologi masyarakat digital, di mana otentisitas dan kepercayaan menjadi bersifat cair dan mudah dimanipulasi. Konten *deepfake* menjadi tantangan serius terhadap integritas informasi karena kemampuannya untuk menciptakan salinan sempurna (simulakra) dari realitas yang tidak pernah terjadi (Danesi, 2024). Kasus ini memperlihatkan bagaimana emosi sering kali lebih dominan dibandingkan rasionalitas (Neyazi & Kuru, 2025), menjadikan konten ini contoh ideal manifestasi *post-truth* yang tidak hanya menyebarkan hoax, tetapi juga memperkuat polarisasi.

Studi terdahulu mengenai *deepfake* di Indonesia cenderung didominasi oleh pendekatan teknologi atau forensik digital, yang berfokus pada deteksi manipulasi visual atau audio. Begitu pula dengan kajian manifestasi *post-truth* dalam konteks pemberitaan Indonesia yang sebagian besar hanya berfokus pada analisis teks berita atau *hoax* konvensional. Adapun studi yang mengkaji kasus

deepfake dengan menggunakan analisis wacana kritis (AWK) dan menelaah relasi kuasa masih terbatas.

Gap penelitian yang diisi oleh penelitian ini adalah minimnya analisis konten *deepfake* sebagai praktik wacana. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis *deepfake* sebagai praktik wacana yang terkonstruksi secara sosial dan ideologis. Selanjutnya yang diisi oleh penelitian ini adalah keterbatasan AWK pada *deepfake*, yakni penelitian terdahulu yang menggunakan AWK dalam konteks politik Indonesia umumnya hanya sebatas menganalisis teks media atau pemberitaan. Adanya kebutuhan untuk menggunakan AWK pada simulakra digital seperti konten *deepfake* ternyata sangat diperlukan untuk memahami bagaimana teknologi ini mereproduksi relasi kuasa dan ideologi.

Adapun letak kebaruan penelitian ini adalah pada analisis wacana kritis pada *deepfake*. Penelitian ini menjadi salah satu pionir dalam menggunakan analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough secara utuh untuk melihat bagaimana konten *deepfake* Sri Mulyani dibentuk, disebarkan, dan diterima. Kebaruan penelitian ini selanjutnya terletak pada fokus komunikasi politik Indonesia, yakni pemahaman tentang bagaimana *deepfake* bekerja sebagai senjata wacana untuk mengeksploitasi isu kesejahteraan guru, memperkuat ideologi populisme anti-elite, dan mendelegitimasi otoritas negara dalam konteks komunikasi politik Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya menjelaskan tentang bagaimana konten *deepfake* beroperasi secara kritis dalam konteks *post-truth* untuk mereproduksi dan menentang kekuasaan dengan menggunakan analisis wacana kritis model Norman Fairclough (Fairclough, 2023). Pendekatan ini memandang wacana sebagai praktik sosial yang tidak terpisah dari konteks kekuasaan, ideologi, dan budaya. Fairclough dipilih karena menawarkan kerangka analisis dengan model tiga dimensi yakni (1) analisis teks: konten *deepfake* sebagai produk manipulatif, (2) praktik wacana dan praktik sosial: sirkulasi di media sosial dan konsumsi, (3) praktik sosial-budaya: kaitannya dengan isu kekuasaan, ideologi, dan konteks sosial yang rentan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini akan diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana konten *deepfake* Sri Mulyani dibentuk, disebarkan, dan diterima dalam konteks budaya *post-truth* Indonesia.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi dan Karakteristik *Post-Truth*

Istilah *post-truth* pertama kali populer setelah digunakan oleh Ralph Keyes (2004) dalam bukunya yang berjudul *The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life*. Keyes menjelaskan bahwa masyarakat modern hidup dalam masa ketika batas antara kebenaran dan kebohongan menjadi kabur. *Post-truth* didefinisikan sebagai keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang kurang signifikan dalam membentuk opini publik dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi (Braahms, 2022). Konsep ini bukan berarti tidak adanya kebenaran, melainkan penolakan sistematis terhadap fakta demi narasi yang menguatkan bias ideologis (Lockie, 2017).

Kebenaran tidak lagi bergantung pada bukti empiris, melainkan pada apa yang dirasakan benar oleh individu atau kelompok emosi dan kepercayaan pribadi menjadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif (Friedman, 2023). Karakteristik utama *post-truth* meliputi: polarisasi emosional, dominasi narasi atas fakta, dan krisis kepercayaan terhadap otoritas sumber informasi (Davis, 2017). Fenomena ini diperkuat oleh mekanisme kognisi sosial di mana individu cenderung mencari dan menerima informasi yang selaras dengan pandangan mereka (*confirmation bias*) (Tandoc, 2019).

Lee McIntyre (2018) dalam *Post-Truth* menjelaskan bahwa *post-truth* bukan sekadar kebohongan, melainkan kondisi epistemologis di mana fakta disengaja diabaikan atau disubordinasikan terhadap opini. Dalam konteks ini, kebenaran menjadi arena kontestasi sosial dan politik yang sangat bergantung pada persepsi public (Hannon, 2023). Fenomena ini erat kaitannya dengan teknologi digital dan media sosial. Teknologi digital memungkinkan individu menjadi produsen sekaligus konsumen informasi tanpa mekanisme verifikasi yang ketat. Dalam situasi ini,

kebenaran menjadi bersifat relatif dan bergantung pada narasi dominan yang berkembang di ruang digital (Visvizi & Lytras, 2019).

2.2 Peran Media Digital: *Filter Bubble* dan *Echo Chamber*

Manifestasi *post-truth* tidak terlepas dari peran media digital. Hal didorong oleh dua faktor utama yakni polarisasi ideologi dan infrastruktur media sosial yang menciptakan *filter bubble* dan *echo chamber* (Ross & Nielsen, 2022). *Filter bubble* (gelembung filter) adalah keadaan isolasi intelektual yang tercipta ketika algoritma sebuah *platform* (seperti Google, Facebook, atau TikTok) secara otomatis memprediksi konten yang ingin dilihat pengguna berdasarkan riwayat pencarian, klik, lokasi, dan interaksi sebelumnya (Kant, 2020). Algoritma bekerja untuk meningkatkan *engagement* pengguna. Jika pengguna sering menonton video yang mengkritik pemerintah, algoritma akan menampilkan lebih banyak video serupa, bahkan jika beberapa di antaranya adalah disinformasi. Akibatnya pengguna jarang terpapar pada fakta atau pandangan yang menantang keyakinan mereka, dan hanya menyajikan konten yang secara emosional atau ideologis *nyaman* bagi pengguna, hingga membuat mereka lebih rentan pada narasi yang menguatkan prasangka.

Sementara *echo chamber* (ruang gema) adalah situasi di mana keyakinan seseorang dikuatkan dan diulang-ulang di dalam komunitas sosial tertutup atau kelompok *online* (seperti grup WhatsApp, grup Facebook, atau *hashtag* tertentu) (Bruns, 2017). Pengguna hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan serupa. Anggota kelompok secara aktif memilih untuk hanya mengikuti, berinteraksi, dan mempercayai sumber dari sesama anggota kelompok, sehingga pandangan yang sama menggema dan mengeras. Akibatnya semakin menguatkan validasi sosial terhadap disinformasi. Ketika teman dan komunitas menyebarkan *hoax*, *hoax* tersebut terasa lebih benar daripada klarifikasi resmi. Mengubah disinformasi menjadi kebenaran ideologis. Jika semua teman di grup mengatakan Sri Mulyani mengatakannya, maka fakta menjadi tidak relevan.

Dalam kondisi ini, *post-truth* bukan hanya persoalan informasi, tetapi juga persoalan budaya dan ideologi. Pengguna media tidak lagi sekadar mencari kebenaran, melainkan juga mencari pengalaman afektif yang memperkuat identitas dan keyakinan mereka. Hal ini sesuai dengan konsep *affective publics* dari Zizi Papacharissi (dalam Fuchs, 2015), yang menekankan bahwa ruang digital menjadi arena ekspresi emosi kolektif yang membentuk makna sosial.

2.3 *Deepfake* sebagai Produk Disinformasi

Deepfake merupakan hasil disinformasi yang paling canggih, yakni pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) untuk menciptakan konten audio-visual yang sangat tampak realistis dan sulit dibedakan dari aslinya, tetapi sebenarnya hasil manipulasi digital (Maras & Alexandrou, 2019). *Deepfake* menjadi manifestasi paling sempurna dari budaya visual di era *post-truth* karena mampu menggantikan realitas dengan hiperrealitas yang direkayasa. Kasus *deepfake* Sri Mulyani menunjukkan bagaimana teknologi ini mampu menciptakan bukti palsu yang meyakinkan dan menciptakan realitas tandingan untuk digunakan memicu respons emosional yang jauh lebih masif daripada klarifikasi faktual.

Menurut Wardle dan Derakhshan (2017), munculnya *information disorder* meliputi *misinformation*, *disinformation* dan *malinformation*. Disinformasi merujuk pada penyebaran informasi palsu yang dilakukan secara sengaja untuk menyesatkan atau merugikan. Misinformasi merujuk pada kesalahan penyebaran informasi yang tidak disengaja. Sementara malinformasi merujuk pada penyebaran informasi benar namun digunakan untuk merugikan pihak lain. Konten yang menjadi objek penelitian ini, yakni narasi "guru sebagai beban negara" yang disebarluaskan melalui video yang diklaim sebagai pernyataan resmi, secara tegas tergolong sebagai disinformasi karena memiliki niat manipulatif untuk memicu ketidakpercayaan publik.

2.4 Analisis Wacana Kritis (AWK) Norman Fairclough

Analisis Wacana Kritis (AWK) merupakan pendekatan studi interdisipliner yang menganalisis bagaimana bahasa mereproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat. AWK memandang wacana bukan sekadar bahasa, melainkan praktik sosial yang berakar pada konteks sosial-budaya tertentu. AWK bertujuan untuk membongkar asumsi tersembunyi dan bias ideologis yang tertanam dalam sebuah teks.

Dalam penelitian ini, digunakan model tiga dimensi dari Norman Fairclough karena keunggulannya dalam menganalisis proses sirkulasi wacana. Norman Fairclough (2023) mengembangkan model yang memandang wacana sebagai praktik sosial yang saling berhubungan dengan struktur sosial dan ideologi. Adapun tiga dimensi tersebut menurut Fairclough adalah:

1. Analisis Teks (mikro): Fokus pada struktur linguistik dan semiotik, seperti diksi, metafora, narasi, atau representasi. Dari konten *deepfake* tersebut, dimensi ini akan mengungkap bagaimana manipulasi teks dilakukan untuk menciptakan ilusi kebenaran dan sentimen anti-elite.
2. Praktik Wacana (meso): Fokus pada proses produksi teks, disebarkan, dan dikonsumsi oleh aktor-aktor sosial. Dari konten *deepfake* tersebut, akan dijelaskan proses pembuatan *deepfake*, pengguguran konteks, dan bagaimana konten tersebut didistribusikan dan dikonsumsi secara viral di media sosial, termasuk interaksi penerima dan peran *sharing* yang didorong emosi. Dimensi ini akan menganalisis konten *deepfake* disirkulasikan sehingga mampu mengalahkan wacana faktual.
3. Praktik Sosial-Budaya (makro): Fokus pada hubungan wacana dengan struktur sosial yang lebih luas, termasuk kekuasaan, ideologi, dan budaya. Dari konten *deepfake* tersebut, akan dianalisis konten *deepfake* dengan struktur kekuasaan (hubungan pejabat vs rakyat), ideologi politik, dan konteks sosial (ketidakpuasan terhadap kesejahteraan guru dan kebijakan negara).

Pada kasus Sri Mulyani, manifestasi *post-truth* berkaitan dengan ideologi populisme anti-elite. Ideologi yang memanfaatkan isu kekuasaan yakni konflik antara pemegang otoritas (Menteri Keuangan) dan publik (komunitas guru) di tengah konteks sosial yang sedang mempermasalahkan gaji dan kesejahteraan guru. *Deepfake* dikatakan berhasil karena mampu menciptakan makna baru yakni ketidakpedulian pemerintah terhadap guru yang pada akhirnya memperkuat sentimen politik dan sosial tertentu.

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis wacana kritis (AWK). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam (*in-depth understanding*) tentang bagaimana *deepfake* diposisikan bukan sekadar produk teknologi, melainkan juga sebagai praktik wacana dan representasi budaya yang mencerminkan ideologi dan relasi kekuasaan di era *post-truth*, yang tidak dapat diukur secara statistik (Creswell, 2017). Metode analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough (2023) digunakan karena model ini mampu menjelaskan hubungan antara teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Model ini relevan untuk menganalisis manifestasi *post-truth* sebagai praktik yang melibatkan teks (video *deepfake*), produksi dan konsumsi (praktik digital), dan konteks sosial (isu guru/APBN).

Penelitian ini dilakukan dalam konteks ruang digital Indonesia, khususnya media sosial seperti TikTok, X (Twitter), YouTube, dan WhatsApp, di mana video *deepfake* Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut “guru sebagai beban negara” beredar dan menjadi viral. Adapun objek penelitian adalah konten *deepfake* yang menampilkan Sri Mulyani Indrawati seolah-olah menyatakan bahwa “guru sebagai beban negara”, beserta pernyataan klarifikasi resmi dari pihak Kementerian Keuangan sebagai wacana tandingan. Untuk sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa cuplikan video *deepfake* Sri Mulyani yang viral di media sosial, transkrip, dan *screenshot* dari konten video. Sementara sumber data

sekunder diperoleh dari berita dan data resmi yang memuat pernyataan klarifikasi atas video *deepfake* tersebut, serta isu kesejahteraan guru dan alokasi APBN, yang berfungsi sebagai konteks sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan pertama adalah dengan melakukan observasi digital yakni melakukan penelusuran terhadap penyebaran konten di *platform* media sosial untuk memetakan penyebaran, sirkulasi, dan penerimaan konten (*echo chamber*). Kedua adalah dengan melakukan dokumentasi yakni mengumpulkan, mengarsip, dan membuat transkripsi audio-visual dari *deepfake* dan video klarifikasi resmi.

Adapun teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis wacana kritis (AWK) model tiga dimensi Fairclough. Proses analisis akan dilakukan secara sistematis dengan berfokus pada unit-unit berikut:

1. Dimensi Teks: unit fokus analisis terletak pada teks dan semiotik visual atau audio. Tujuannya adalah untuk menganalisis elemen linguistik (diksi, metafora, nada) dan semiotik visual atau audio yang dimanipulasi oleh AI. Berdasarkan konten *deepfake*, fokus analisis terletak pada diksi "beban negara" dan bagaimana manipulasi ini menciptakan bukti palsu semiotik untuk mengonstruksi Sri Mulyani sebagai tokoh yang antagonis.
2. Dimensi Praktik Wacana: unit fokus analisis terletak pada pemetaan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuannya adalah untuk menganalisis proses produksi *deepfake* (tujuan manipulasi), distribusinya (*platform*, *filter bubble*, *echo chamber*), dan konsumsinya (reaksi emosional, pengguguran konteks yang disengaja, dan polarisasi).
3. Dimensi Praktik Sosial Budaya: unit fokus analisis terletak pada konteks sosial, ideologi, dan relasi kuasa. Tujuannya adalah untuk menganalisis kaitan wacana *deepfake* dengan isu yang lebih luas yaitu kesejahteraan guru dan APBN, serta isu ideologis yaitu ideologi populisme anti-elite. Dimensi ini melihat bagaimana *deepfake* digunakan untuk mendelegitimasi otoritas negara dan mereproduksi struktur kekuasaan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teoritis dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari tiga sumber berbeda yaitu membandingkan dan mengonfirmasi video rekayasa *deepfake*, pernyataan klarifikasi resmi, konteks isu faktual mengenai data kesejahteraan guru dan APBN. Triangulasi teoritis adalah dengan menggunakan kerangka AWK Norman Fairclough tiga dimensi untuk memastikan analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mendalam dan terstruktur secara teoritis.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis konten *deepfake* yang menampilkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang seolah-olah menyatakan bahwa "guru merupakan beban negara karena tidak menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi". Video ini pertama kali beredar di media sosial pada bulan Agustus 2025, dan dengan cepat menjadi viral. Analisis dilakukan menggunakan tiga dimensi analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya.



Gambar 1. Konten *Deepfake* Sri Mulyani Sebut “Guru Sebagai Beban Negara”
 Sumber: Youtube/HarianSurya, 2025

Publik, khususnya kalangan guru dan tenaga pendidik, menanggapi video tersebut dengan kemarahan dan kekecewaan. Banyak komentar bernada emosional, menyebut Sri Mulyani tidak menghargai profesi guru. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan fakta oleh sejumlah media arus utama seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia, diketahui bahwa video tersebut adalah hasil manipulasi teknologi *deepfake* (video.kompas.com, 2025). Video tersebut menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk meniru wajah, suara, dan gaya bicara Sri Mulyani, sehingga tampak seolah-olah beliau benar-benar mengucapkan pernyataan itu. Dalam konteks inilah, video *deepfake* Sri Mulyani menjadi bahan analisis untuk memahami bagaimana kebenaran diproduksi, disebarkan, dan dimaknai ulang di ruang digital.

Tabel 1. Temuan Berdasarkan Tiga Dimensi AWK Norman Fairclough

No	Dimensi AWK	Fokus Analisis	Temuan Penelitian	Hubungan Teoritis
1	Teks	Semiotik & Linguistik <i>Deepfake</i>	Manipulasi AI menciptakan bukti palsu semiotik berupa sinkronisasi audio dan visual. Diksi “beban negara” dipilih karena berpotensi memicu kemarahan moral. Alhasil menciptakan polarisasi antara Elite vs. Guru.	<i>Post-truth</i> dimulai dengan manipulasi bukti visual yang menggantikan fakta objektif. <i>Deepfake</i> menghasilkan simulakra yang meniru otentisitas (Danesi, 2024).
2	Praktik Wacana	Produksi, Distribusi & Konsumsi	Terjadi pengguguran konteks secara diskursif (memotong pidato asli) untuk mengganti wacana rasional dengan wacana konflik emosional. Video menjadi viral didorong oleh sirkulasi masif melalui <i>filter bubble</i> dan <i>echo chamber</i> , yang menghasilkan validasi emosional (<i>high engagement</i> hoaks, <i>low engagement</i> klarifikasi).	<i>Post-truth</i> diperkuat oleh algoritma yakni validasi sosial/emosional dalam <i>echo chamber</i> lebih dominan daripada verifikasi fakta. Praktik produksi bertujuan menginterupsi wacana rasional (Fairclough, 2023).

No	Dimensi AWK	Fokus Analisis	Temuan Penelitian	Hubungan Teoritis
3	Praktik Sosial Budaya	Ideologi & Relasi Kuasa	<i>Deepfake</i> secara strategis menggunakan isu ketidakpuasan publik yakni kesejahteraan guru/honorer. Konten ini semakin memperkuat ideologi populisme anti-elite dengan mengonfirmasi prasangka publik bahwa pejabat "menghina rakyat".	Wacana <i>deepfake</i> berfungsi sebagai alat ideologis untuk mendelegitimasi otoritas negara melalui serangan moral/emosional, dan bukan kritik berbasis data. Ini berkaitan dengan konsep relasi kuasa (Maynard & Mildenerger, 2018).

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025



Gambar 2. Konten Video Asli Pidato Sri Mulyani Di Institute Teknologi Bandung
 Sumber: Youtube/CNNIndonesia, 2025

4.1 Dimensi Teks: Bukti Palsu Semiotik dan Polarisasi

Temuan pada Dimensi Teks menunjukkan bahwa *deepfake* berhasil menciptakan bukti palsu semiotik. Berbeda dengan *hoax* berbasis teks biasa, *deepfake* memanfaatkan citra kredibel figur otoritas (Sri Mulyani) dan teknologi AI untuk menghasilkan sinkronisasi visual dan audio yang hampir sempurna. Fenomena ini sejalan dengan konsep *post-truth* di mana kebenaran visual yang direayasa mampu menggantikan fakta objektif, menghasilkan simulakra dari realitas yang tidak pernah ada (Danesi, 2024).

Pilihan diksi "guru sebagai beban negara dan tidak menghasilkan nilai tambah" bukan bersifat netral. Frasa ini sarat makna negatif yang dirancang untuk memicu kemarahan moral publik. Melalui konstruksi teks, *deepfake* berhasil menciptakan polarisasi antara Elite (yang dituduh menghina guru) dan Guru (pihak yang dihina). Hal ini membuktikan bahwa frasa tersebut dipilih karena potensi emosionalnya, bukan karena kebenarannya.

4.2 Dimensi Praktik Wacana: Pengguguran Konteks dan Validasi Emosional

Analisis Praktik Wacana mengungkapkan strategi utama konten *deepfake* adalah pengguguran konteks secara diskursif. Pidato asli Sri Mulyani yang kompleks mengenai tantangan APBN dan pembiayaan pendidikan dipotong secara brutal. Praktik ini menunjukkan pemahaman terhadap logika media sosial: narasi yang ringkas dan memicu emosi lebih diutamakan daripada konteks yang

rumit. Tujuannya adalah untuk menginterupsi wacana rasional dan menggantinya dengan wacana konflik (Fairclough, 2023).

Temuan *high engagement* pada *deepfake* (puluhan hingga ratusan ribu *views* dan *shares*) berbanding terbalik dengan *low engagement* pada konten klarifikasi, yang diperkuat oleh sirkulasi masif di ruang gema (*echo chamber*) melalui *filter bubble* (gelembung filter). Hal ini menjadi bukti kuat Manifestasi *Post-Truth*: di dalam *echo chamber*, narasi yang sesuai dengan prasangka kelompok cenderung diterima sebagai validasi emosional dan sosial, membuat klarifikasi resmi yang berbasis fakta objektif menjadi tidak efektif. Dalam lingkungan digital yang terpolarisasi, emosi terbukti lebih bernilai daripada kebenaran.

4.3 Dimensi Praktik Sosial Budaya: Populisme Anti-Elite dan Delegitimasi Kekuasaan

Pada dimensi Praktik Sosial Budaya, ditemukan bahwa konten *deepfake* beroperasi di tengah konteks sosial yang rentan, yaitu isu ketidakpuasan mendalam mengenai kesejahteraan guru, honorer, dan alokasi APBN. Konten ini menargetkan Sri Mulyani sebagai figur yang paling erat dengan kekuasaan keuangan.

Secara ideologis, konten ini berfungsi sebagai alat ideologis untuk memperkuat populisme anti-elite. Narasi "beban negara" berhasil mengonfirmasi prasangka bahwa elite politik/negara tidak peduli dan menghina rakyat, khususnya komunitas pendidik. Dengan memicu konflik moral, *deepfake* berhasil mendelegitimasi otoritas pemerintah tanpa memerlukan kritik kebijakan berbasis data (Maynard & Mildenerger, 2018). Kasus ini menegaskan bahwa keberhasilan manifestasi *Post-Truth* dicapai ketika ia mampu memobilisasi kemarahan publik dengan mengeksploitasi ketidakpuasan sosial yang mendalam.

5 SIMPULAN

Berdasarkan analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough terhadap konten *deepfake* Sri Mulyani tentang narasi "Guru Sebagai Beban Negara," penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan manifestasi *post-truth* yang berhasil melalui tiga dimensi yang saling berkaitan:

1. Dimensi Teks: *Deepfake* berhasil menciptakan bukti visual palsu melalui manipulasi audio-visual, yang berfungsi sebagai inti dari *post-truth*. Pilihan diksi "beban negara" secara sengaja digunakan untuk memicu konflik dan kemarahan moral, berhasil mengonstruksi citra Menteri Keuangan sebagai figur antagonis yang jauh dari kerakyatan.
2. Dimensi Praktik Wacana: Manifestasi *post-truth* didukung oleh praktik sirkulasi dan algoritma digital yang manipulatif. Produsen *deepfake* secara diskursif melakukan pengguguran konteks dari pidato asli, meninggalkan narasi emosional yang singkat dan viral. Penyebaran konten ini dipercepat di dalam ruang gema (*echo chamber*) dan gelembung filter (*filter bubble*) media sosial, di mana validasi sosial terhadap narasi emosional lebih dominan daripada validasi faktual, menyebabkan klarifikasi resmi menjadi tidak efektif.
3. Dimensi Praktik Sosial-Budaya: *Deepfake* ini berfungsi sebagai senjata ideologis yang mengeksploitasi isu sensitif terkait kesejahteraan guru dan sentimen anti-elite. Wacana ini berhasil mendelegitimasi otoritas pemerintah dan memperkuat polarisasi, dengan mengarahkan fokus publik dari perdebatan kebijakan yang rasional ke konflik emosional, menegaskan bahwa *post-truth* beroperasi efektif ketika ia berakar pada ketidakpuasan sosial yang mendalam.

Secara keseluruhan, kasus ini membuktikan bahwa *deepfake* bukan sekadar *hoax* biasa, melainkan alat politik canggih yang mampu merusak kepercayaan publik dan menggantikan realitas faktual dengan realitas emosional yang direayasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Brahms, Y. (2022). *Philosophy of post-truth*. Institute for National Security Studies (INSS).
- Bruns, A. (2017, September). Echo chamber? What echo chamber? Reviewing the evidence. In *6th Biennial Future of Journalism Conference (FOJI7)* (Vol. 14, pp. 1-11).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Danesi, M. (2024). Simulacrum Culture. In *AI-Generated Popular Culture: A Semiotic Perspective* (pp. 159-174). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Fairclough, N. (2023). Critical discourse analysis. In *The Routledge handbook of discourse analysis* (pp. 11-22). Routledge.
- Fuchs, C. (2015). Social media and the public sphere. In *Culture and economy in the age of social media* (pp. 315-372). Routledge.
- Friedman, J. (2023). Post-truth and the epistemological crisis. *Critical Review*, 35(1-2), 1-21.
- Hannon, M. (2023). The politics of post-truth. *Critical Review*, 35(1-2), 40-62.
- Kant, T. (2020). *Making it personal: Algorithmic personalization, identity, and everyday life*. Oxford University Press.
- Kaur, A., Noori Hoshyar, A., Saikrishna, V., Firmin, S., & Xia, F. (2024). Deepfake video detection: challenges and opportunities. *Artificial Intelligence Review*, 57(6), 159.
- Keyes, R. (2004). *The post-truth era: Dishonesty and deception in contemporary life*. Macmillan.
- Kwok, A. O., & Koh, S. G. (2021). Deepfake: a social construction of technology perspective. *Current Issues in Tourism*, 24(13), 1798-1802.
- Laybats, C., & Tredinnick, L. (2016). Post truth, information, and emotion. *Business Information Review*, 33(4), 204-206.
- Lockie, S. (2017). Post-truth politics and the social sciences. *Environmental Sociology*, 3(1), 1-5.
- Maras, M. H., & Alexandrou, A. (2019). Determining authenticity of video evidence in the age of artificial intelligence and in the wake of Deepfake videos. *The international journal of evidence & proof*, 23(3), 255-262.
- Maynard, J. L., & Mildenerger, M. (2018). Convergence and divergence in the study of ideology: A critical review. *British Journal of Political Science*, 48(2), 563-589.
- McIntyre, L. (2018). *Post-truth*. MIT Press.
- Neyazi, T. A., Khai Ee, T., & Kuru, O. (2025). Campaign Deepfakes and Affective Polarization: The Role of Artificial Intelligence in Campaigns in Shaping Voter Attitudes. *Social Science Computer Review*, 08944393251362247.
- Ross Arguedas, A., Robertson, C., Fletcher, R., & Nielsen, R. (2022). Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: A literature review.
- Smith, J. E. (2022). The internet is not what you think it is: A history, a philosophy, a warning.
- Tandoc Jr, E. C. (2019). The facts of fake news: A research review. *Sociology Compass*, 13(9), e12724.
- Visvizi, A., & Lytras, M. D. (Eds.). (2019). *Politics and technology in the post-truth era*. Emerald Publishing Limited.
- Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. *Technology innovation management review*, 9(11).
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27, pp. 1-107). Strasbourg: Council of Europe.
- Hoax: Guru itu Beban Negara dalam https://www.instagram.com/p/DNiSrWdz_QR/?utm_source=ig_web_copy_link yang diakses pada 11 November 2025 pukul 16:49 WIB.
- [KLARIFIKASI] Video Sri Mulyani Sebut Guru sebagai Beban Negara adalah Rekayasa AI dalam <https://video.kompas.com/watch/1870323/klarifikasi-video-sri-mulyani-sebut-guru-sebagai-beban-negara-adalah-rekayasa->

- ai?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop diakses pada 04 November 2025 pukul 16:21 WIB
- Sebut Video Viral Hoaks, Berikut Pidato Lengkap Sri Mulyani di KSTI dalam <https://youtu.be/xzFS-S27qcI?si=hg-NLQx6Bnv-y5ZF> yang diakses pada 04 November 2025 Pukul 16:23 WIB.
- Sri Mulyani: Video Saya Sebut Guru Beban Negara Hoax, Hasil Deepfake dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250820063702-532-1264246/sri-mulyani-video-saya-sebut-guru-beban-negara-hoax-hasil-deepfake> diakses pada 04 November 2025 pukul 16.00 WIB
- Video Sri Mulyani Sebut Guru Jadi 'Beban Negara', Kemenkeu: Itu Hoaks! Dibuat dari AI dalam <https://youtu.be/8K5AoPiV1CM?si=rrRfQDewKy4vcXIN> diakses pada 04 November 2026 pukul 16:19 WIB